

MEMBANGUN DEMOKRASI TANPA NEGARA

PUSTAKA CATUT

Membangun Demokrasi Tanpa Negara

Penulis: Jungkir Maruta

Diambil dari Medium Pustaka Catut

(yang pertama kali diterbitkan pada Juni 30 2024)

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive

2025

Sejak anarkisme modern muncul pada pertengahan abad ke-19, para anarkis secara konsisten mengusulkan federalisme dari komune demokrasi langsung sebagai pengganti negara. Ini adalah kelembagaan dimana orang-orang melakukan pengambilan keputusan terhadap hal-hal penting yang menyangkut kehidupan mereka, dan bukan dengan menyerahkannya urusan ini hanya pada segelintir orang. Pengembangan ini, meski bukan hal baru pada zamannya, pertama kali dilakukan oleh Pierre-Joseph Proudhon, yang sering disebut sebagai "Bapak Pendiri Anarkisme" dari Perancis. Dalam Du Principe fédératif (1863), ia menyatakan bahwa "sistem federal adalah kebalikan dari hierarki atau sentralisasi administratif dan pemerintahan." Menurutnya,

"Yang terpenting dan merupakan ciri dari kontrak federal, [...] adalah bahwa dalam sistem ini para pihak yang mengadakan kontrak, baik itu kepala keluarga, kota, kanton, provinsi, atau negeri, tidak hanya melakukan hubungan bilateral dan kewajiban komutatif [saling membalas], namun dalam membuat perjanjian tersebut mereka punya lebih banyak hak, kebebasan, wewenang, dan lebih banyak harta benda daripada yang mereka tinggalkan. [...]"

Federalisme Proudhon masih diusung oleh Mikhail Bakunin, yang menerjemahkan Das Capital ke dalam Bahasa Rusia. Meski Bakunin menarik ilham dari analisis ekonomi Marx, tetapi tidak dengan politiknya. Ia menolak kediktatoran proletariat dan mengawinkan komunisme Marx dengan politik federalisme Proudhon. Bakunin menulis:

"... hari ini kita menyimpulkan bahwa kita mendukung perlunya menghancurkan negara. Atau, jika disetujui, merubahnya secara radikal dan menyeluruh sehingga, setelah tidak lagi menjadi kekuasaan yang terpusat dan diorganisir dari atas ke bawah, yang dijalankan dengan kekerasan atau otoritas berdasarkan prinsip tertentu, mereka dapat mengakui –dengan

kebebasan mutlak bagi semua pihak untuk bergabung atau melepaskan diri [...] dari bawah ke atas, sesuai dengan kebutuhan nyata dan kecenderungan alami dari pihak yang terlibat, lewat federasi bebas oleh individu, asosiasi, komune, distrik, provinsi, dan negeri atas nama kemanusiaan."

Pada generasi selanjutnya, Peter Kropotkin kemudian memberikan kredit soal federalisme kepada Bakunin. Ia bahkan menuliskannya dengan optimis, menyebutnya sebagai "komune kita yang terfederasi di masa depan". Negara dan federasi baginya adalah dua pertentangan. "Komune," tulis Kropotkin, dalam situasi kekuatan ganda, "akan mengetahui bahwa ia harus menghancurkan Negara dan menggantikannya dengan Federasi."[1]

Secara garis besar, para anarkis sepakat tentang penerapan demokrasi langsung dalam Komune yang jumlahnya masuk akal untuk pertemuan tatap muka. "Bentuklah kelompok-kelompok kecil, yang berdaulat secara individu, dan satukan mereka melalui pakta federal," tulis Proudhon. Tapi tidak ada Komune yang dapat berdiri sendiri. Peter Kropotkin menganggap bahwa eksperimen komune yang berhasil harus dilakukan dengan terfederasi. Dari satuan yang kecil, ia kemudian terorganisir dalam organisasi mencakup wilayah yang semakin meluas. Dalam penjelasan Bakunin: "prinsipnya tidak lain daripada federasi bebas individu-individu menjadi komune, komune menjadi provinsi, provinsi menjadi bangsa-bangsa, dan, akhirnya, bangsa-bangsa menjadi Serikat Eropa terlebih dahulu, dan pada akhirnya seluruh dunia."

Kaum marxis, yang selalu gagal memahami anarkis, membuat tuduhan bahwa anarkis punya khayalan yang kekanak-kanakan atau tidak pernah memikirkan secara serius usulan pasca kehancuran negara. Tuduhan mereka tidak perlu

[1] Peter Kropotkin. Words of a Rebel (1885).

diambil pusing. Yang lebih memprihatinkan adalah kegagalan kaum anarkis dalam mengartikulasikan federalisme. Dipengaruhi oleh trend pasca-kiri dan tradisi anti-organisasionalis yang diperbaharui, ada kaum anarkis yang memberikan definisi bernada nihilistik untuk anarkisme yang lebih liar, spontan, informal, tanpa ragu-ragu membawa kekacauan ke intinya.[2] Mereka yang sering meninggalkan federalisme karena kecurigaan penuh atas segala bentuk kelembagaan, seradikal apapun itu.

Banyak penulis anarkisme pasca-kiri telah memberikan analisis berguna untuk kenyataan modernitas yang kita hadapi, yang tak terbayangkan oleh generasi Bakunin. Tapi kami menolak pendekatan yang kurang bermanfaat, macam Hakim Bey: "Meskipun imajinasi kita bersifat utopis, kita tidak tahu apa yang diharapkan. Tapi setidaknya kita sudah siap untuk hanyut ke hal yang tidak diketahui."[3] Sebaliknya, kami adalah anarkisme yang mewariskan beberapa pendekatan lama untuk disesuaikan dalam keadaan yang baru. Kami adalah gerakan anarkis yang memiliki program, sebuah gambaran kasar, dan karena itu kami mesti terorganisir, karena kami tahu kemana kami hendak menuju dan bagaimana menuju ke sana: federalisme adalah salah satu unsur penting dalam menanggulangi kelembagaan tersentralisir yang bertanggung jawab atas krisis iklim.

---

[2] Hakim Bey, dalam Immediatism (1994) menulis: "Anarkisme mengatakan bahwa 'negara harus dihapuskan' hanya untuk menggantikannya dengan bentuk tatanan baru yang lebih radikal. Namun Anarki Ontologis menjawab bahwa tidak ada 'negara' yang bisa 'ada' dalam kekacauan, bahwa semua klaim ontologis adalah palsu kecuali klaim kekacauan (yang bagaimanapun juga tidak dapat ditentukan), dan oleh karena itu pemerintahan dalam bentuk apa pun adalah tidak mungkin."

[3] Ibid.

Sementara kaum Kiri Baru tahun 60-80'an masih sibuk dengan Che Guevara dan Mao, dan anarkisme semakin berpengaruh dalam gerakan pemuda dan kontra-budaya, seorang Trotskyis Amerika Serikat, yang juga mantan stalinis, meninggalkan visi Marx untuk merebut kuasa negara dalam misi mencari alternatif yang lebih libertarian untuk masyarakat ekologis. Ia adalah Murray Bookchin. Dirinya mungkin adalah kiri pertama pada zamannya yang memperhatikan krisis lingkungan yang semakin menjadi-jadi dan yang pertama membawa isu iklim pada gerakan sosialis.

Setelah mempelajari teks primer anarkis, Bookchin menemukan usulan lembaga anarkis lewat demokrasi langsung terfederasi. Menurutnya, negara-bangsa saat ini harus dilenyapkan dan kekuasaannya diserahkan kepada warga dalam majelis-majelis. Merekalah yang bisa mengambil keputusan, misalnya terkait lingkungan hidup, dan bukannya pada kelas penguasa industri. Karena masing-masing komunitas ini memiliki otonomi, maka dengan sendirinya ini akan mencegah pengambilan keputusan yang tersentralisir karena memukul keanekaragaman bioregional. Mirip Kropotkin, Bookchin merasa bahwa karena majelis hanya bekerja di suatu wilayah, agar dapat berfungsi di wilayah geografis yang lebih luas, mereka harus bersatu—menjadi konfederasi. Bookchin menyebut konsep politiknya sebagai munisipalisme libertarian. Ia mulai mengklaim diri sebagai anarkis. Dalam *The Ecology of Freedom* (1982), Bookchin menyebutkan jejak historis yang dirujuknya:

"[...] orientasi konfederasi masih melekat dalam tulisan-tulisan Proudhon, yang secara provokatif menyatakan dirinya sebagai seorang 'anarkis'; dalam Bakunin, yang membantu menjadikan anarkisme menjadi sebuah gerakan; dan Kropotkin, yang memperkaya anarkisme dengan kekayaan tradisi sejarah, visi pragmatis yang luar biasa mengenai alternatif teknologi dan sosial yang ditawarkannya [...]"

Karena tidak tahan atas kritik dari kubu anarkis anti-organisasional, yang diejeknya sebagai “anarkis gaya hidup”, Bookchin kemudian menyebut politiknya sebagai "Komunalisme" (dengan K besar). Ia juga memilih elektoralisme di tingkat lokal untuk mewujudkannya. Sampai di sini, praktik Bookchin di Vermont tidak menarik untuk dibahas. Tapi gagasannya kelak akan menginspirasi penerapannya oleh jutaan orang, bukan di Amerika, tapi di Timur Tengah.

Dengan keruntuhan Soviet, ada trend peralihan besar-besaran dari kaum marxis. Salah satunya Abdullah Öcalan, pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang membaca *The Ecology of Freedom* dari dalam penjara dan menganjurkan seluruh militan PKK untuk membacanya pula. PKK awalnya dipandu oleh prospek pembentukan negara bangsa Kurdi berdasarkan basis Marxis-Leninis, tetapi menjadi kecewa dengan model negara-bangsa dan sosialisme negara. Öcalan bertukar surat sampai Bookchin meninggal pada 2006. Untungnya, Öcalan yang menyebut dirinya "murid yang baik" dari Bookchin, berhasil meneruskan gagasannya lewat konsep politik yang disebutnya sebagai konfederalisme demokratik. Dalam tulisannya, Öcalan mengakui asal dan peranan untuk teori konfederalismenya yang tidak baru-baru amat:

“Ramalan mereka [anarkis], bahwa negara-bangsa yang sentralistik akan menjadi bencana bagi seluruh kelas pekerja dan gerakan kerakyatan, serta menghancurkan harapan mereka, adalah realistis. [...] Pernyataan mereka tentang perkembangan sejarah yang berpihak pada negara-bangsa berarti kerugian besar bagi utopia kebebasan dan kesetaraan, serta kritik mereka terhadap kaum Marxis karena berpihak pada negara-bangsa dan menyalahkan mereka atas pengkhianatan, adalah aspek

yang penting untuk ditekankan. Mereka membela konfederalisme."[4]

Berbeda dengan platform Bookchin yang mengusulkan ikut elektoralisme lokal, usulan Öcalan berhasil diciptakan lewat perjuangan bersenjata yang gigih oleh etnik Kurdi di negeri yang mereka sebut "Rojava" saat Perang Sipil Suriah 2011. PKK mengambil kesempatan perang sipil itu bukan untuk membentuk negara baru, tetapi mendeklarasikan konfederasi, yang diorganisir secara bertahap sejak 2013, dan sekarang disebut sebagai Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES).

Langkah Rojava telah diikuti pemberontak Zapatista di Chiapas, Meksiko. Pada November 2023, EZLN mengumumkan pembubaran struktur pemerintahan MAREZ dengan membentuk dewan warga (GAL) yang sepenuhnya otonom dan desentralis. Jika sebelumnya terdapat beberapa MAREZ, sekarang ada ribuan GAL. Dengan demikian Zapatista menerapkan demokrasi langsung di tingkat basis. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi pertukaran kontak dan delegasi dari Zapatista-Rojava.

Meski begitu, Rojava telah dikecam karena dukungan militer AS, dan dalam hal ini saya perlu membela mereka. Perang Sipil Suriah ditandai dengan peta politik yang rumit dan mungkin hanya dapat ditandingi situasinya oleh Myanmar. Saat itu, ada banyak faksi ikut berperang. Pasukan oposisi pemberontak melawan pemerintahan Suriah Assad, yang juga tengah menghadapi j*hadis Islam IS*S. Turki mendukung salah satu faksi pemberontak yang lain, dan AS mendukung Kurdi dengan bantuan persenjataan, dana dan dukungan militer. Kepentingan AS hanyalah menghancurkan IS*S. Setelah urusannya selesai, AS tetap berdiam diri saat Turki

[4] Abdullah Öcalan. Reevaluating Anarchism (2002).

menginvasi Afrin, salah satu kanton (setara provinsi) di Rojava. Ini membuat Kurdi kehilangan nyaris lebih dari seperempat wilayahnya.

Saat ini, Kurdi sedang mencari siapa pun untuk membela mereka, tidak peduli siapa. Pada Oktober 2019, Kurdi bertemu sekutu barunya: pemerintah Suriah Assad. Melalui kesepakatan yang ditengahi oleh Rusia, Suriah akan membantu Kurdi, meskipun hal ini kemungkinan akan merugikan otonomi Kurdi. Namun seperti yang dikatakan oleh Panglima SDF, Jenderal Mazloum Abdi, "Jika kami harus memilih antara kompromi atau genosida, kami akan memilih rakyat kami."

Riwayat dukungan AS tidak sedikitpun membuat Rojava menjadi kurang revolusioner. Bagaimanapun, tolok ukur kami tertuju terutama pada keberhasilan mendirikan struktur horizontal dan komitmen untuk politik bergaya libertarian. Hal ini tidak menghentikan dukungan dan keterlibatan anarkis di Rojava, terlepas dari kekurangan di sana-sini (seperti kegagalan ekonomi koperasi di tengah embargo, atau keterlibatan yang lebih rendah dalam konfederasi di wilayah dengan populasi Arab, atau sumber daya yang sebagian besar dikerahkan ke militer akibat ancaman keamanan di seluruh sisi, dan sebagainya).

Rojava dan Zapatista memang tidak pernah menyebut dirinya anarkis, dan kami juga tidak akan melakukannya. Dalam hal ini, bagi kami penerapan lebih penting ketimbang label ideologis. Federasi Anarkis Rio de Janeiro (FARJ) menyebut fenomena ini sebagai "vektor sosial anarkisme": bukan gerakan anarkis, tapi gerakan rakyat dengan pengaruh anarkis yang kuat terutama dari segi praktiknya, sebab orang-

orang berhimpun untuk tuntutan khusus.[5] Dalam kasus Rojava dan Zapatista, perjuangan untuk otonomi menjadikan keduanya memiliki karakter sosialis libertarian karena menerapkan demokrasi langsung dan federalisme. Oleh karena itu, jika seseorang bertanya, apa contoh kongkrit anarkis hari ini, saya tetap sebut setidaknya dua: di Suriah dan Meksiko.

Tentu saja, adalah ironi jika gerakan kerakyatan di negara Selatan Global semakin melirik anarkisme, tetapi sebaliknya anarkis modern menelantarkan usulan-usulan yang telah digodok oleh para pendahulunya, dan mengabaikan usulan-usulan yang terus diartikulasikan dan diberi nafas hingga hari ini. Öcalan, yang menulis di balik penjara, telah menaruh harapannya kepada para anarkis: "Dalam perjuangan yang semakin cepat dan mengedepankan aspek budaya di Timur Tengah, ada kemungkinan bagi kaum anarkis untuk memperbarui diri dan memberikan sumbangsih yang kuat. Mereka adalah salah satu kekuatan penting yang diperlukan untuk berkolaborasi dalam upaya rekonstruksi modernitas demokratis."[6]

Untuk menyahut Öcalan, apa tanggapan yang pantas dari para anarkis? Bukankah usulan-usulan itu disusun oleh segelintir teoritikus kulit putih, dengan kemungkinan yang cenderung Eurosentris, dan karena itu justru jadi bantu sandungan bagi agenda dekolonisasi jika didikte ke tempat dengan keadaan yang berbeda? Hal ini telah dijawab dengan meyakinkan oleh Proudhon ratusan tahun silam: "Sistem federal berlaku untuk semua bangsa dan segala zaman, karena umat manusia bersifat progresif di setiap generasi dan

[5] FARJ. Social Anarchism and Organization (2008). Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Jonathan Payn. Diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit Daun Malam.
[6] Abdullah Öcalan. Reevaluating Anarchism (2002).

masyarakatnya."[7] Meski tokoh anarkis klasik melacak jejak federalisme dari contoh historis di Eropa, Bookchin mempelopori kajian dekolonisasi ini dengan mengutip praktik-praktik federalisme dari pribumi Amerika, seperti Konfederasi Iroquois. "Kita bisa berharap," tulis Bookchin, "bahwa Komune akan bercita-cita untuk hidup bersama, disuburkan, dan diberi makan oleh makhluk hidup yang secara asli merupakan bagian dari ekosistem dimana mereka terintegrasi."[8]

Jika pribumi Amerika bisa, kita juga. Untuk menelusurinya, kita harus keluar dari historiografi nusantara yang selalu berpusat pada penguasa, dan karena itu selalu menulis sejarahnya para raja. Alih-alih menaklukan banyak kampung ke dalam satu institusi monarki yang terpusat dan dipimpin oleh seorang raja, bukti antropologis yang melimpah menunjukkan terbentuknya sejenis federalisme longgar dan sederhana dari kampung-kampung yang otonom satu sama lain. Di Kalimantan Tengah, Dayak Ma'anyan pernah mengenal federasi Paju Sepuluh (Sepuluh Kampung) dan Paju Epat (Empat Kampung), dimana masing-masing kampung memiliki kepala dengan otoritas yang minimal dan satu koordinator untuk menghubungkan satu sama lain. Sistem ini diwakili oleh semboyan mantir epat pangulu isa yang berarti "empat mantir satu penghulu". Di Kalimantan Barat, Dayak Krio memiliki aliansi sembilan kampung yang berjalan dengan cara yang sama dan diwakili oleh semboyan umakng desa samilan damong sapuluh yang berarti "wilayah sembilan desa dengan sepuluh domong."[9] Di Sulawesi Utara, orang-orang Minahasa mengenal federasi yang diikat dengan perjanjian

[7] Pierre-Joseph Proudhon. The Federative Principle (1863).
[8] Murray Bookchin. The Ecology of Freedom (1982).
[9] Bima Satria Putra. Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan (2021), hlm 175-177.

Watu Pinawetengan.[10] Di Sumatera Barat, proyek pembentukan negara dari era Adityawarman sepertinya gagal, karena rajanya tidak punya otoritas, dan alhasil tercipta federasi longgar dari berbagai nagari yang sepenuhnya otonom satu sama lain.[11]

Komune-komune di atas, apapun namanya (paju, desa atau nagari), yang secara kelembagaan de facto terhubung dalam struktur horizontal, menunjukkan sifat universal dari praktik federasi, otonomi dan komunalisme demokrasi langsung yang terdesentralisasi. Meski secara teoritik, konfederalisme demokratik memang dirumuskan mulai dari anarkis Eropa, tapi saat ini konsepnya tengah dipraktikkan masyarakat adat di Timur Tengah dan Amerika Latin, dan membuka kemungkinan di masa depan untuk persilangan dengan jenis federalisme tradisional yang pernah dijalankan leluhur kita di Asia Tenggara. Menariknya, Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni (KNDF-05) yang tengah menghadapi tentara junta Myanmar telah mengirimkan pesan solidaritas ke Rojava—dan dibalas. Apakah Myanmar akan menjadi konfederalisme demokratik pertama di Asia Tenggara? Apa peran serta yang dapat diisi anarkis dalam proses ini?

Cita-cita anarkisme terlalu sayang jika terus dibiarkan tidak terorganisir. Kita harus menyampaikan visi untuk perjuangan di tingkat massa dan mewujudkannya melalui organisasi alternatif yang tersebar, beragam dan terhubung satu sama lain dari bawah ke atas. Dalam pengertian Errico Malatesta: “anarki

[10] Alexandraa Kraatz. “From human sacrifice to cigarettes and coke,” dalam Axel Michaels, Claus Ambos, dan Eftychia Stavrianopoulou (peny.), Transformations in Sacrificial Practices (2008), hlm 187.

[11] Audrey Kahin. Rebellion to integration: West Sumatra and the Indonesian polity, 1926-1998 (1999), hlm 21-22.

adalah organisasi, organisasi, dan lebih banyak organisasi." Dalam pengertian saya: anarki adalah membubarkan satu dewan perwakilan untuk membentuk jutaan dewan rakyat. Kunci untuk keselarasan individu dan kolektif ada di situ.

Bisa jadi kita tidak pernah berhasil. Bisa jadi kemusnahan massal membatalkan seluruh proyek progresif apapun yang secara rasional memungkinkan. Satu hal yang pasti, harapan saya untuk masa depan ada di konfederalisme demokratik. Percobaan kita belum selesai. ▼

Saran Bacaan:

Janet Biehl. Politik Ekologi Sosial: Munisipalisme Libertarian

Peter Kropotkin. Mengapa Eksperimen Skala Kecil Selalu Gagal.

Teks primer lainnya:

1. Pierre-Joseph Proudhon – The Federative Principle.

2. Mikhail Bakunin - Federalism, Socialism, Anti-Theologism.

3. Murray Bookchin – The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy.

4. Abdullah Öcalan – Democratic Confederalism.